

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Jonaedi Efendi, dkk. *Kamus Hukum Populer*, Prenada Media Indonesia, e-books.granmedia.com

Mr. J. B. J.M Ten Berg, (Disunting oleh Philipus M. Hadjon 1992), *Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan I, Yuridika, Surabaya, 1993

Fandy Tjiptono, *Manajemen Operasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Sugiyono, *Pengertian Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2013

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018

Bahder Johan, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, 2004

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Winarno Surachman, *Data dan Teknik Research Pengertian Metodologi Ilmiah*, CV Tarsito, Bandung, 1973

- Pusat Baca Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Umar Ma'ruf, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah dan Asas-Asas Hukum Pertanahan*, Cetakan I, UNISSULA Press, Semarang, 2014
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014
- , *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Tanah*, Kencana Devisi Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- Eman, *Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Dyara Radhite Oryza Fea, *Mengurus Sertifikat Tanah, Rumah, dan Perizinan, Buku Pintar*, Yogyakarta, 2016
- S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara (Administrative Law)*, Cetakan I, FH UII Press, Yogyakarta, 2018
- W.F. Prins & R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada Press University, Yogyakarta, 2002
- Y. Sri Pudjyatmoko, *Perizinan Problem, dan Upaya Pembinaan*, PT. Grasindo, Jakarta 2009

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Edisi Revisi), Cetakan XII, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*, Cetakan I, Sinar Grafika Jakarta, 2010
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Teguh Soejono, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Tarsito, Bandung, 1998
- Muhadi Zaenudin, Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Dalam Islam, (Normatif dan Historis)*, Al-Muhsin Press, Yogyakarta, 2002
- Depag RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, PT Toha Putra, Semarang, 1995
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Kalam Mulia, Jakarta, 2009
- Warwick Forrest, *Manual For Environmental Law Eforment and Casework Project Report*, (penyunting) Suparto Wijoyo, *Persyaratan Perizinan dan Arti Pentingnya*, Jawa Timur, 1998
- Pudyatmoko, (penyunting), *Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah*, Jakarta, 2016
- Jhon Salindeho, (Terjemahan bebas), *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Robert Na Endi Jaweng, KPPOD (penyunting) Tim Peneliti, *Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah*, Jakarta 2016

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Staatblad)

Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) S. 1926 – 227

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Nomor 003 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

## **C. Sumber Lain / Internet**

<https://www.suaramerdeka.com/pemkab-brebes-hapus-izin-ho>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

<https://kbbi.web.id/pemegang>, diakses tanggal 24 Agustus 2019

<https://www.legalakses.com/surat-izin-gangguan-hinderordonantie-ho>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019

<https://lahanindustri.wordpress.com/legalitas-kepemilikan-tanah>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

<https://rifqiharrys.wordpress.com/hak-atas-tanah>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019

<https://www.atrbpn.go.id>, diakses pada tanggal 19 November 2019

#### **D. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Bpk. Nanang Raharjo, SE., MH (Kasi Kebijakan, Pengaduan, dan Advokasi Bidang Pelayan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Brebes), pada tanggal 18 November 2019

Wawancara dengan Ibu Galuh Maharani, SE (Kasi Pelaporan dan Dokumen Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Brebes), pada tanggal 25 November 2019